



PENYELENGGARAAN PILKADA SEHAT DI MASA PANDEMI COVID-19

“SEBUAH BEST PRACTICE DI NEGERI BUNDA TANAH MELAYU”

Oleh:

Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos, M.Si

SERETARIS DAERAH SELAKU KETUA HARIAN SATGAS PENANGANAN COVID-19
DAN PEMULIHAN EKONOMI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

*Disampaikan sebagai bahan Materi ke III (15.30-17.00 WIB)
Pada RAKOR BADAN KESBANG dalam rangka mendukung Sukses
PILKADA Serentak di Masa Pandemi COVID-19*



Dr. Drs. Bakhtiar, M.Si
Pjs. Gubernur Kepulauan Riau



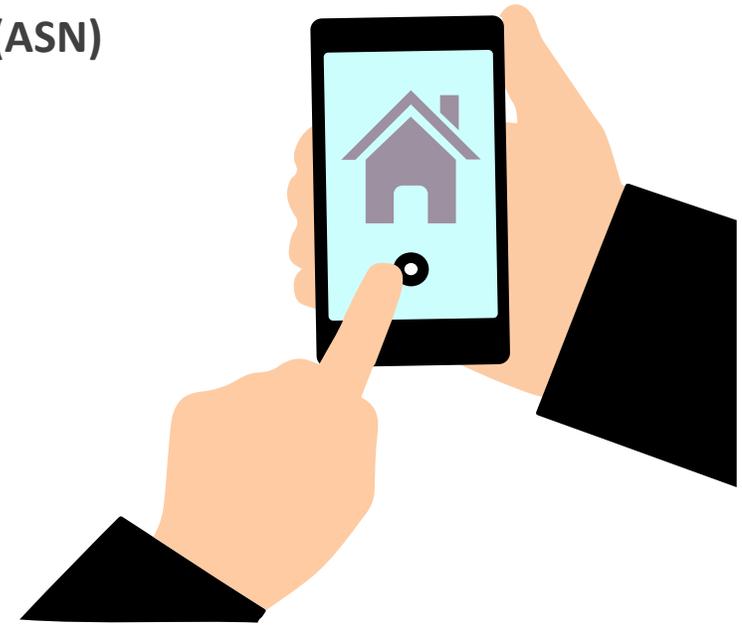
Dr. H. T. S. ARIF FADILLAH, S.Sos, M.Si
Sekretaris Daerah

AULA WAN SERI BENI, 16 NOVEMBER 2020

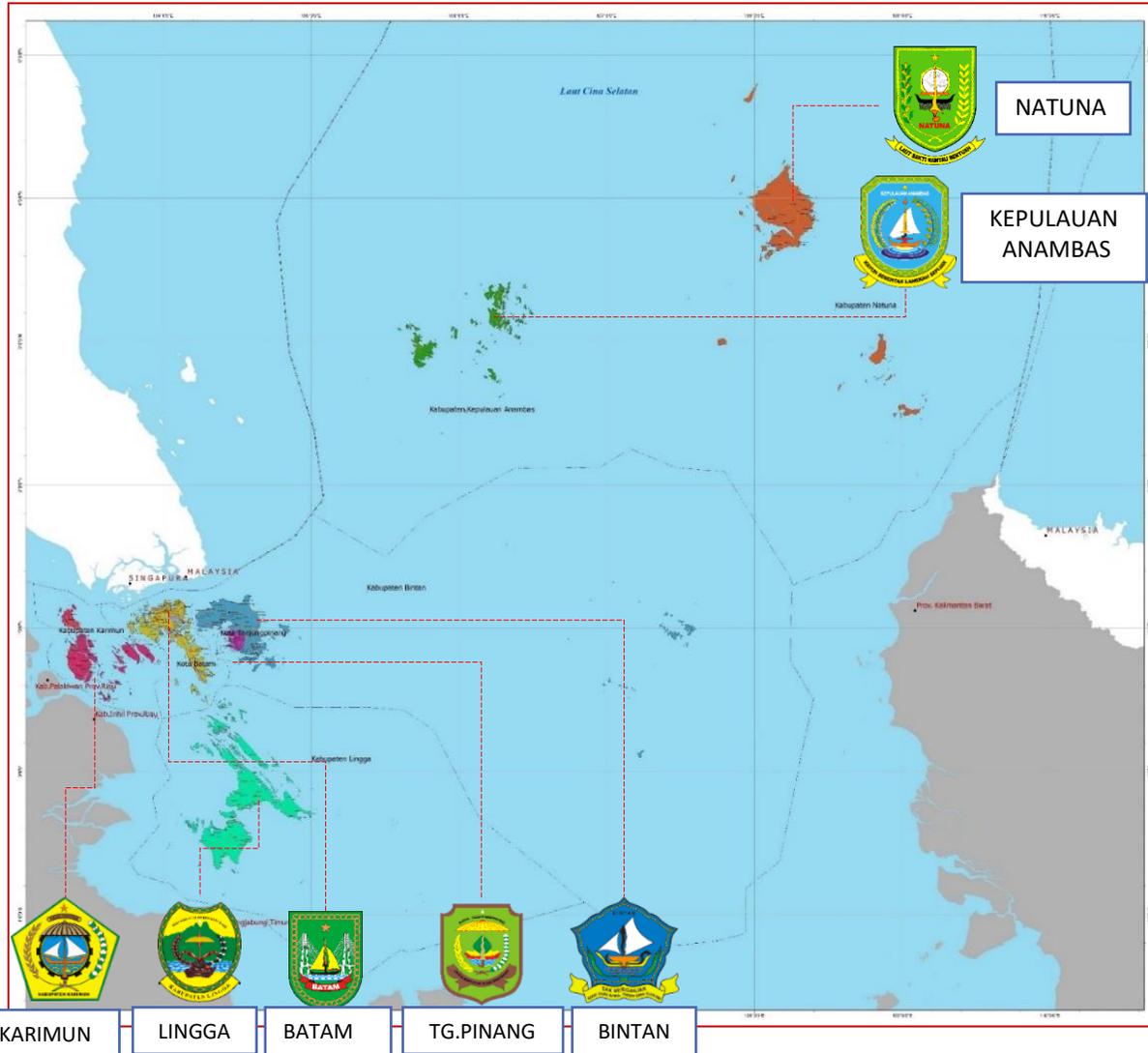


OUTLINE

- 01** | KONDISI EXISTING COVID-19
- 02** | PERKEMBANGAN & UPAYA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020
- 03** | GERAKAN PILKADA SEHAT 2020 DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
- 04** | PERCEPATAN REAKTIVASI KAWASAN WISATA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Gambaran Umum



Geografi

Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi 00⁰29' Lintang Selatan dan 04⁰40' Lintang Utara, serta 103⁰22' dan 109⁰4' Bujur Timur. Luas Wilayah Kepulauan Riau yang berupa daratan adalah seluas 8.201,72 Km².

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Provinsi di Indonesia dengan 4 Kabupaten:

1. Kabupaten Karimun; (912,75 Km²)
2. Kabupaten Bintan; (1.318,21 Km²)
3. Kabupaten Natuna; (2.009,04 Km²)
4. Kabupaten Lingga; (2.266,77 Km²)

Dan 2 Kota:

1. Kota Batam; (960,25 Km²)
2. Kota Tanjungpinang . (144,56 Km²)

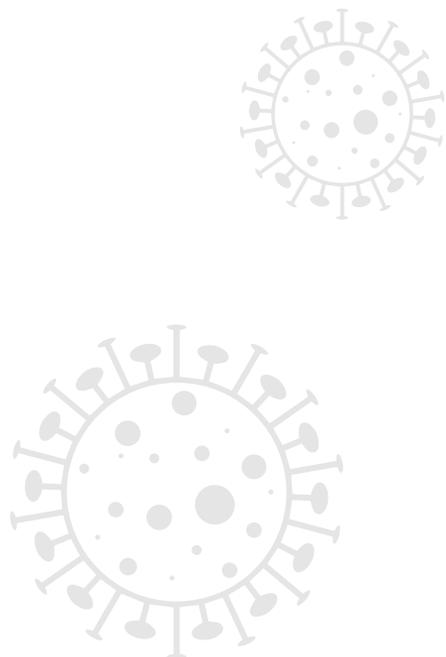
Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas (590,14 Km²) sebagai hasil pemecahan wilayah Kabupaten Natuna.

Luas Wilayah tersebut diatur dalam Pemdagri RI No. 72 Tahun 2019 Tanggal 8 Oktober 2019.

Jarak antara Ibu kota Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota:

1. Tanjungpinang-Karimun : 76 Km;
2. Tanjungpinang-Bintan : 20 Km;
3. Tanjungpinang-Natuna : 440 Km;
4. Tanjungpinang-Lingga : 60 Km;
5. Tanjungpinang-Kep. Anambas: 194 Km;
6. Tanjungpinang-Batam : 44 Km;
7. Tanjungpinang-Tanjungpinang: 0 Km.

1 KONDISI EXISTING



“PERKEMBANGAN COVID-19”



DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KONFIRMASI

↑ **4.757** (+38)

KASUS AKTIF

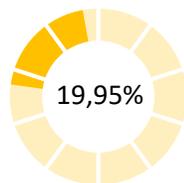
↑ **949** (+14)

SEMBUH

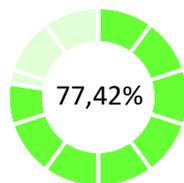
↑ **3.683** (+23)

MENINGGAL

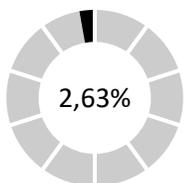
↑ **125** (+1)



● KASUS AKTIF



● SEMBUH



● MENINGGAL

1 KOTA BATAM

z	KONFIRMASI	: 3.517	(+25)	%
o	KASUS AKTIF	: 653	(+11)	18,57%
n	SEMBUH	: 2.776	(+13)	78,93%
a	MENINGGAL	: 88	(+1)	2,50%



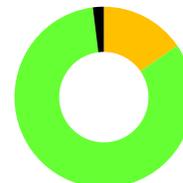
2 KOTA TANJUNGPINANG

z	KONFIRMASI	: 728	(+9)	%
o	KASUS AKTIF	: 161	(+1)	22,12%
n	SEMBUH	: 549	(+8)	75,41%
a	MENINGGAL	: 18	(-)	2,47%



3 KABUPATEN BINTAN

z	KONFIRMASI	: 254	(+4)	%
o	KASUS AKTIF	: 39	(+3)	15,35%
n	SEMBUH	: 210	(+1)	82,68%
a	MENINGGAL	: 5	(-)	1,97%



4 KABUPATEN KARIMUN

z	KONFIRMASI	: 220	(-)	%
o	KASUS AKTIF	: 65	(-)	29,55%
n	SEMBUH	: 143	(-)	65,00%
a	MENINGGAL	: 12	(-)	5,45%



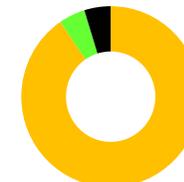
5 KABUPATEN LINGGA

z	KONFIRMASI	: 7	(-)	%
o	KASUS AKTIF	: 2	(-)	28,57%
n	SEMBUH	: 4	(-)	57,14%
a	MENINGGAL	: 1	(-)	14,29%



6 KABUPATEN NATUNA

z	KONFIRMASI	: 21	(-)	%
o	KASUS AKTIF	: 19	(-1)	90,48%
n	SEMBUH	: 1	(+1)	4,76%
a	MENINGGAL	: 1	(-)	4,76%



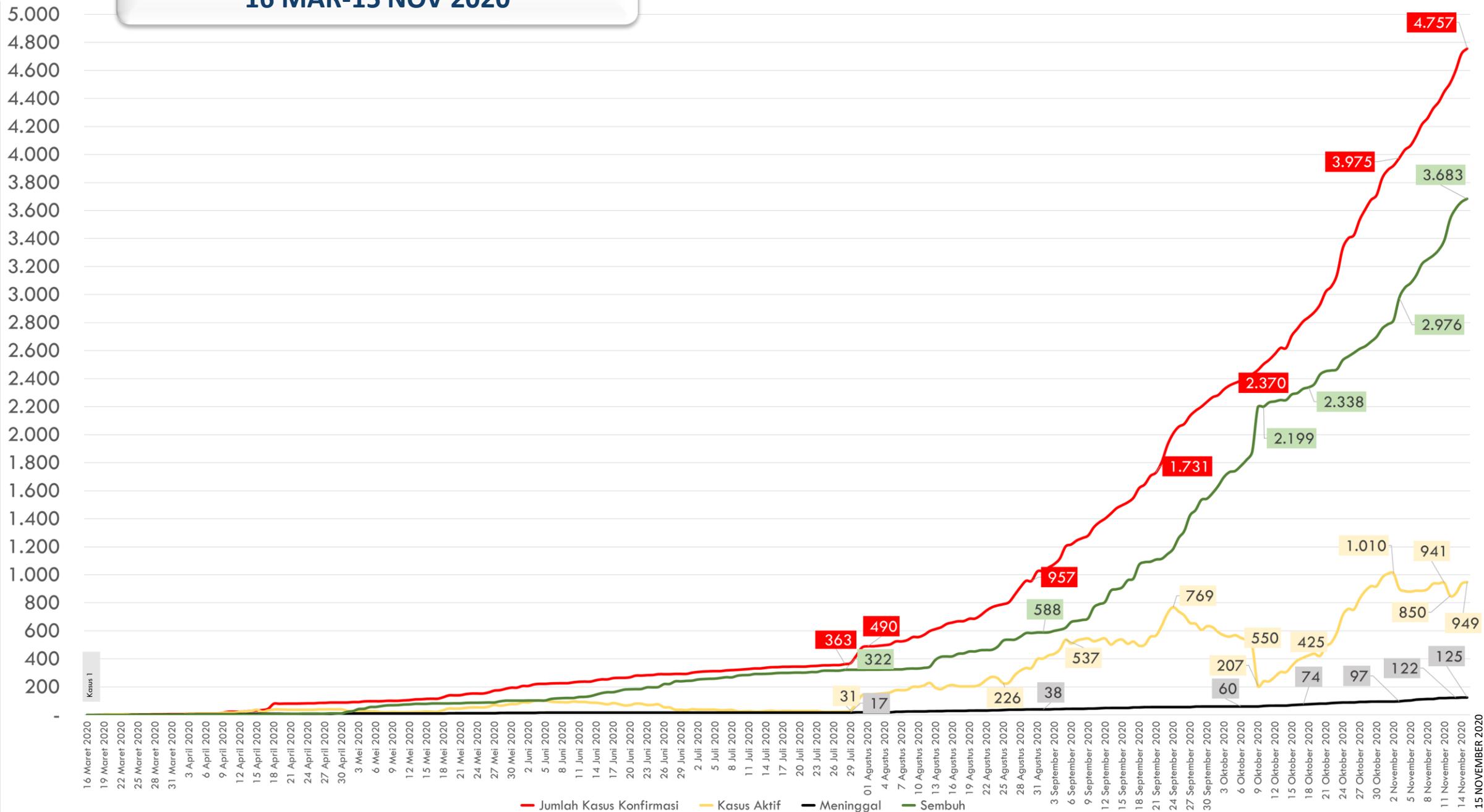
7 KABUPATEN ANAMBAS

z	KONFIRMASI	: 10	(-)	%
o	KASUS AKTIF	: 10	(-)	100,00%
n	SEMBUH	: 0	(-)	0,00%
a	MENINGGAL	: 0	(-)	0,00%



GRAFIK PERKEMBANGAN COVID 19

16 MAR-15 NOV 2020



PERATURAN

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19



PERGUB KEPRI
NO. 42 TAHUN 2020
TANGGAL
27 AGUSTUS 2020



PERWAKO
TANJUNGPINANG
NO 44 TAHUN 2020
TANGGAL
3 SEPTEMBER 2020



PERWAKO BATAM
NO. 49 TAHUN 2020
TANGGAL
1 SEPTEMBER 2020



PERBUP ANAMBAS
NO. 43 TAHUN 2020
TANGGAL
17 SEPTEMBER 2020



PERBUP BINTAN
NO. 52 TAHUN 2020
TANGGAL
21 SEPTEMBER 2020



PERBUP KARIMUN
NO. 49 TAHUN 2020
TANGGAL
10 SEPTEMBER 2020



PERBUP NATUNA
NO. 51 TAHUN 2020
TANGGAL
25 AGUSTUS 2020

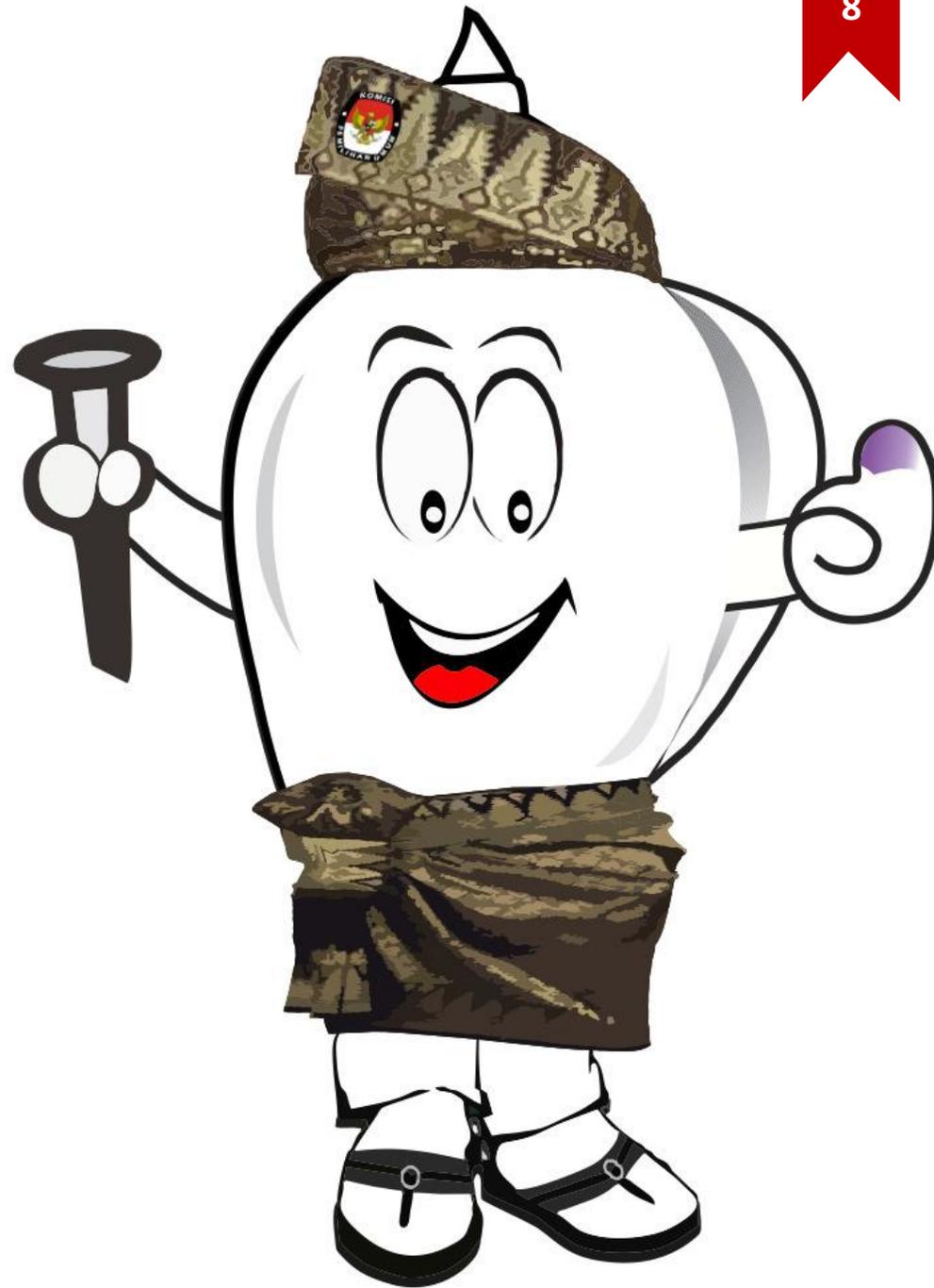


PERBUP LINGGA
NO. 95 TAHUN 2020
TANGGAL
11 SEPTEMBER 2020

2

PERKEMBANGAN DAN UPAYA

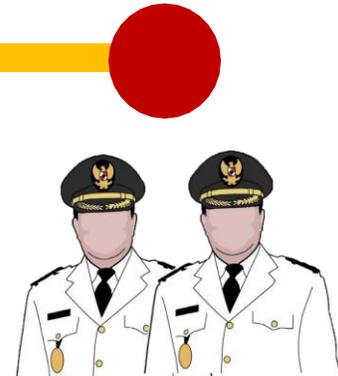
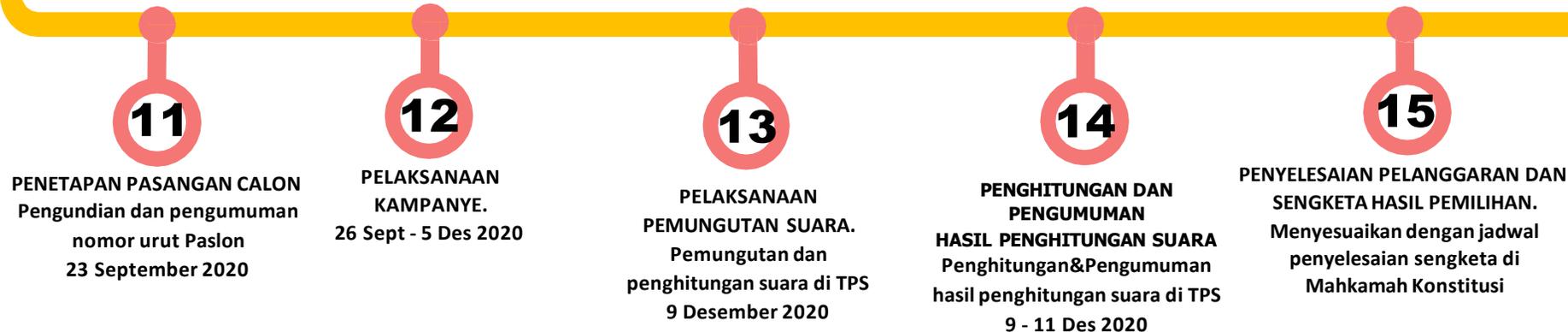
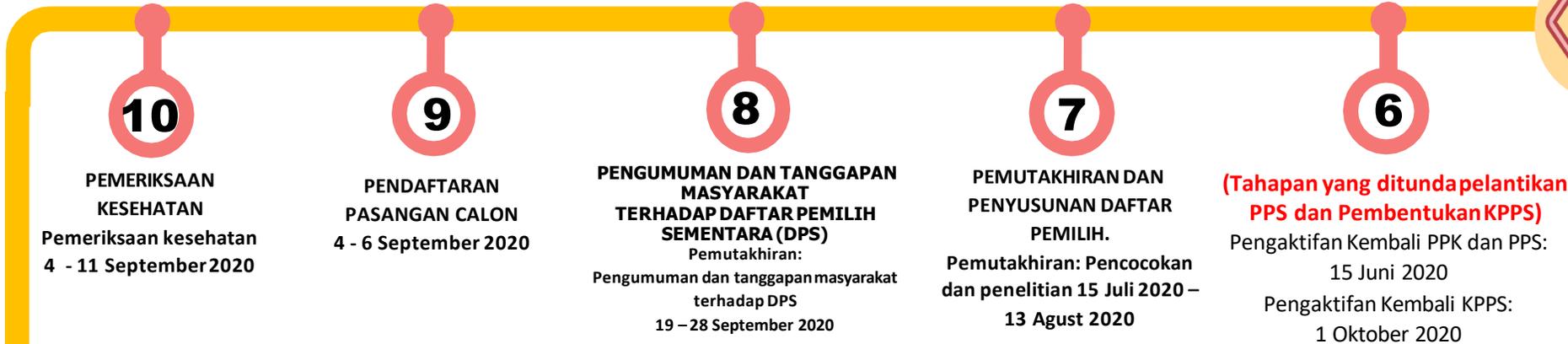
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN
PILKADA SERENTAK 2020



TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 (Berdasarkan PKPU 2 Tahun 2020)



KEPUTUSAN KPU TANGGAL 21 MARET 2020 NOMOR 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 TTG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUB/WAGUB, BUP/WABUP, DAN/ATAU WALKOT/WAWALKOT TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENYEBARAN COVID-19



PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA

BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEP. ANAMBAS



SEBARAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH
1.	TANJUNGPINANG	4	18	444	149,354
2.	BATAM	12	64	2,177	587,527
3.	BINTAN	10	51	353	110,379
4.	LINGGA	13	82	244	70,545
5.	KARIMUN	12	71	555	165,780
6.	NATUNA	15	77	170	52,896
7.	KEPULAUAN ANAMBAS	10	54	119	31,707
TOTAL		76	417	4,062	1,168,188

ALOKASI ANGGARAN

PILKADA SERENTAK 2020 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	KPU	BAWASLU	PENGAMANAN	JUMLAH
1.	KEPULAUAN RIAU	98.279.300.000	47.116.029.000	21.485.000.000	166.880.329.000
2.	BINTAN	12.750.000.000	6.750.000.000	2.500.000.000	22.000.000.000
3.	KARIMUN	16.248.710.400	10.750.661.000	4.048.347.000	31.047.718.400
4.	LINGGA	9.500.000.000	4.428.736.000	1.500.000.000	15.428.736.000
5.	NATUNA	16.500.000.000	8.000.000.000	3.500.000.000	28.000.000.000
6.	KEP. ANAMBAS	14.022.000.000	7.020.000.000	2.074.987.000	23.116.987.000
7.	BATAM	23.218.327.000	11.663.717.000	6.991.650.000	41.873.694.000
JUMLAH		190.518.337.400	95.729.143.000	42.099.984.000	328.347.464.400

PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK 2020

(Sesuai Permendagri No. 41 Tahun 2020)

NO	INSTANSI	PENANDATANGANAN	NILAI (Rp)	ADENDUM	PERSENTASE PENCAIRAN
1.	KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU	12 September 2019	76.500.000.000		
	ADENDUM	27 Januari 2020	98.279.300.000	98.279.300.000	100 %
	TAHAP I		1.200.000.000		
	TAHAP II		60.000.000.000		
	TAHAP III		37.079.00.000		
2.	BAWASLU KEPULAUAN RIAU	12 September 2019	49.693.637.000	47.116.029.000	100 %
	TAHAP I		1.200.000.000		
	TAHAP II		34.600.000.000		
	TAHAP III		13.893.637.000		
3.	PENGAMANAN		19.485.000.000	21.485.000.000	100 %
	(POLDA/KOREM 033 WP LANTAMAL IV TANJUNGPINANG LANUD RHF TANJUNGPINANG)				
JUMLAH KEBUTUHAN ANGGARAN SETELAH ADENDUM			166.880.329.000		

5 LANGKAH MENCIPTAKAN STABILITAS POLITIK & KEAMANAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1

MENGOPTIMALKAN PERAN FORKOPIMDA



2

MENDORONG SINERGITAS APARAT DAN STAKE HOLDER TERKAIT



3

OPTIMALKAN PERAN FORUM KEMITRAAN (FKDM, FKUB, FPK, LAM, MUI, DMI, PGI, WALUBI, PERGURUAN TINGGI, FORUM RT/RW dll)



4

MENDORONG PERAN TOGA, TOMAS, TODAT DALAM MENJAGA KONDUSIFITAS



5

MENINGKATKAN KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH, KPU, BAWASLU dan ISTANSI TERKAIT



HELP DESK PILKADA KEPRI

Alamat:

Jl. S.M. Amin No.1 Tanjungpinang (Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau)

FUNGSI

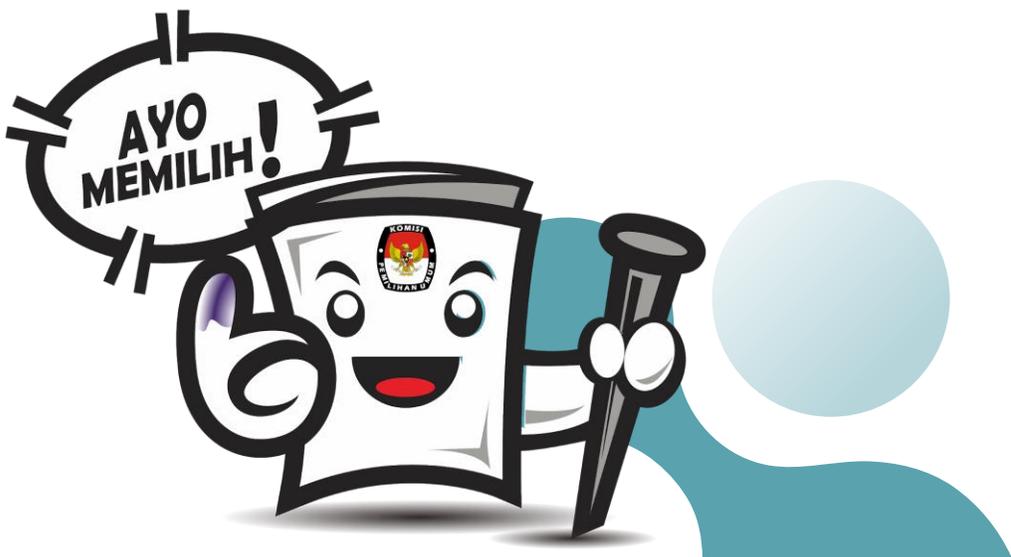
Sebagai wadah komunikasi dan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan pilkada serentak 2020 Provinsi Kepulauan Riau

TUGAS

1. Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Provinsi Kepulauan Riau;
3. Inventarisasi serta memberikan saran dalam rangka penyelesaian masalah yang timbul pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Provinsi Kepulauan Riau; dan
4. Menyusun laporan harian terkait Pilkada Serentak 2020 Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3

GERAKAN PILKADA SEHAT 2020 DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA



1

Launching Gerakan 5 Juta Masker Untuk Mewujudkan Pilkada Sehat 2020 Dilaksanakan Secara Serentak Diseluruh Wilayah Se-provinsi Kepulauan (Mulai Dari Tingkat Provinsi Hingga Desa/Kelurahan);

2

Kampanye 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan pakai Sabun dan Menjaga Jarak) secara massif;

3

Pengawasan secara Intensif pada setiap pelaksanaan Tahapan Pilkada dan Aktifitas masyarakat pada ruang publik; dan

4

Pendisiplinan Masyarakat melalui pelaksanaan **Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan** yang berpedoman kepada Peraturan Kepala Daerah tentang *Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19*.

NO	NAMA	JUMLAH	
1	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	3.700.715	PCS
<i>(SUMBANGAN TEMASEK FOUNDATION, KONJEN SINGAPURA, HIMPUNAN KAWASAN INDUSTRI, KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATAM, HARBOUR BAY, PERBANKAN, BUMN, OPD PROV. KEPRI)</i>			
2	KOTA BATAM	1.000.000	PCS
3	KOTA TANJUNGPINANG	300.000	PCS
4	KABUPATEN BINTAN	150.000	PCS
5	KABUPATEN KARIMUN	300.000	PCS
6	KABUPATEN LINGGA	39.000	PCS
7	KABUPATEN NATUNA	117.000	PCS
8	KABUPATEN KEP. ANAMBAS	66.499	PCS
9	DESA SE-PROV. KEPRI	625.000	PCS
JUMLAH		6.298.214	PCS

UPAYA MEWUJUDKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PILKADA 2020 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

IMPLEMENTASI

1. Melalui Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Kepada Bupati/Walikota Se-provinsi Kepulauan Riau Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara;
2. Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Aturan/Ketentuan Netralitas Aparatur Sipil Negara;
3. Pelaksanaan Apel Bersama “IKRAR NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA” Diikuti Oleh Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Penandatanganan Naskah “IKRAR NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA” oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; dan
5. Melaksanakan Pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan oleh Kepala OPD masing-masing.

PERLINDUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PROFESIONAL/NETRAL

PERMASALAHAN

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional/Netral dianggap tidak mendukung Pasangan/Calon Kepala Daerah terpilih;
2. Berakibat pada Mutasi/Demosi/Kehilangan jabatan bagi ASN yang Profesional/Netral;
3. Menjadi dilema tersendiri yang dapat mengakibatkan Resistensi bagi para ASN dalam melaksanakan Peraturan/Ketentuan terkait Netralitas ASN.

SOLUSI

1. Mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan penataan Kembali manajemen kepegawaian, berkaitan dengan mutase/demosi/promosi karier jabatan ASN:
2. Mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat terhadap kebijakan mutasi jabatan ASN yang dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih:
3. Mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan *reward and punishment* yang objektif dalam rangka penegakan netralitas ASN di Pemerintah Daerah.

4 REAKTIVASI PARIWISATA SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI



YANG TELAH SIAP UNTUK Mendukung Pelaksanaan Reaktivasi Kawasan Pariwisata Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Berbasis CHSE (*CLEANLINESS, HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY*)

KOTA BATAM



MONTIGO- NONGSA



KABUPATEN KARIMUN



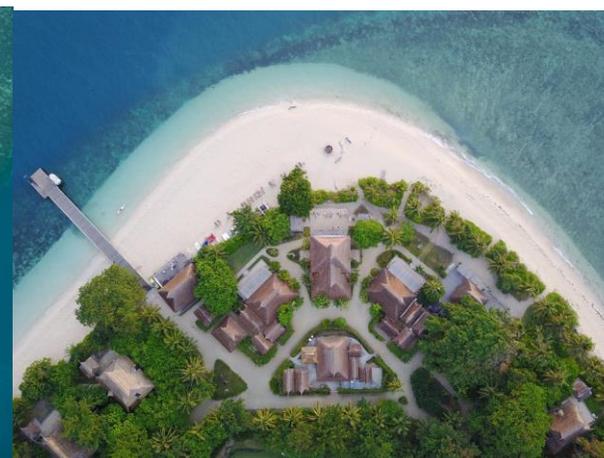
TELUNAS RESORT - SUGI

KABUPATEN BINTAN

TURI BEACH - NONGSA



NONGSA POINT MARINA - NONGSA



KAWASAN WISATA LAGOI - BINTAN

PRIVATE ISLAND CEMPEDAK

PRIVATE ISLAND NIKOI

1. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga sehingga Pandemi COVID-19 memberikan dampak secara langsung terhadap penurunan Wisatawan Mancanegara serta pertumbuhan Ekonomi;
2. Provinsi Kepulauan Riau Meraih Peringkat Kedua Nasional dalam hal **Kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun 2019** dengan jumlah **2.864.795 orang**;
3. Pembatasan Mobilitas antar Negara memberikan dampak terjadinya Kontrasi Ekonomi tercatat pada Triwulan III Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau **(-3,51 %)** jika dibandingkan periode yang sama Tahun 2019.



LATAR BELAKANG

UPAYA PERCEPATAN REAKTIVASI KAWASAN WISATA

Melakukan inspeksi guna memastikan kesiapan fasilitas pendukung meliputi kesiapan Pelabuhan internasional serta bandar udara dan memastikan kesiapan pengelola Kawasan wisata untuk mendukung pelaksanaan Reaktivasi Kawasan Wisata berbasis CHSE;

Pengoperasian peralatan PCR-Test di Kawasan Wisata Lagoi sebagai Kawasan Wisata dengan jumlah pengunjung terbesar di Provinsi Kepulauan Riau;

Menyurati para Menteri dan Stakholder terkait guna pembukaan pintu masuk Kepulauan Riau serta meyakinkan Pemerintah Singapura dan Pemerintah Malaysia untuk membuka membuka pintunya dan mengizinkan warga negaranya untuk berkunjung ke Kepulauan Riau;

Akan menyurati Kedubes Malaysia di Indonesia untuk membuka pintu masuk johor bahru;

Ekspose keberhasilan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan Kabinet Indonesia Maju dengan menerapkan Protokol Kesehatan dengan berbasis CHSE yang akan dilaksanakan di Kawasan Wisata Lagoi pada 24 s/d 26 September 2020 yang lalu.

